

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Perubahan Luas Kawasan dan Zonasi TNGGP

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) merupakan salah satu kawasan konservasi di Jawa Barat dengan tipe ekosistem hutan hujan tropis pegunungan. Sumberdaya alam hayati dan ekosistem di TNGGP memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Penggunaannya secara berkelanjutan mutlak mengikuti tiga pilat konservasi yaitu perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari-optimal untuk menjaga kelestarian fungsi dan kualitas sistem penyangga kehidupan. Kawasan TNGGP berbatasan secara langsung dengan kawasan Perum Perhutani. Pada tahun 2003 berdasarkan SK Menhut No 174, TNGGP mengalami perluasan $\pm 7\,655$ ha yang berasal dari areal Perum Perhutani. Areal Perluasan eks-Perum Perhutani tersebut merupakan lingkaran terluar sepanjang kawasan TNGGP sehingga saat ini menjadi batas baru bagi kawasan TNGGP

TNGGP berada di wilayah 3 kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi dengan kota-kota besar yang berada di sekitarnya seperti Jakarta, Bogor dan Bandung, merupakan wilayah yang terus berkembang, sehingga menjadi ancaman sekaligus tekanan pada kawasan konservasi ini. Di satu sisi, sebagai kawasan konservasi, potensi sumberdaya alam hayati TNGGP dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Sosial ekonomi masyarakat di sekitar TNGGP pada umumnya tergolong desa miskin. Tercatat terdapat 66 desa yang berbatasan langsung dengan kawasan TNGGP, berpenduduk 454.325 jiwa dengan rata-rata pendidikan SD/SLTP dan tingkat pendapatan sekitar Rp 100 000/jiwa/bulan. Mata pencaharian 70 persen petani, lahan milik sendiri 34 persen (<0.25 ha/kk) dan 55,2% adalah petani penggarap. Desa Ciputri merupakan desa berbatasan langsung dengan hutan TNGGP dan sebagian besar penduduk menjadi petani penggarap di kawasan TNGGP. Tidak lebih dari 92% masyarakat sekitar kawasan berinteraksi langsung dengan kawasan

konservasi dengan menggantung hidupnya pada sumber daya alam hayati kawasan TNGGP.

Perubahan zonasi kawasan TNGGP diperlakukan pada tanggal 22 februari 2011 dengan adanya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Nomor SK.39/IV-KKBJL/2011 mengenai Zonasi Taman Nasional Gunung Gede pangrango. Zonasi di TNGGP terbagi menjadi 7 (tujuh) Zona yakni:

1. Zona Inti seluas 9.612.592 Ha (42.06%)
2. Zona Rimba seluas 7.175.396 Ha (31.40%)
3. Zona Pemanfaatan seluas 1 330.424 Ha (5.82%)
4. Zona Rehabilitasi seluas 4.367.192 Ha (19.11%)
5. Zona Tradisional seluas 312.136 Ha (1.36%)
6. Zona Khusus 3,19 Ha (0.01%)
7. Zona Konservasi Owa Jawa seluas 50,10 Ha (0.21%).

Perubahan luasan Kawasan TNGGP tersebut mengubah zonasi di Desa Ciputri yang awalnya kawasan hutan produksi milik Perum Perhutani melalui PHBM mejadi Zona Rehabilitasi milik Balai Besar TNGGP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya alamiahnya, zona rehabilitasi merupakan areal perubahan fungsi dari hutan produksi terbatas menjadi kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. oleh karena itu wilayah Resort Sarongge, Desa Ciputri perlu dilakukan rehabilitasi atau restorasi dengan menanam tanaman endemik agar kawasan dapat berfungsi.

B. Pemangku Kepentingan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

a. Perum Perhutani

Pada tanggal 29 Maret 1972, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972, Pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau disingkat Perum Perhutani. Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara yang berada dibawah naungan Kementerian Kehutanan dan Perkebunan Dasar. Hukum

Perum Perhutani sebagaimana ditetapkan dalam PP No 15 Tahun 1972, kemudian berturut turut mengalami perubahan dengan PP no 36 tahun 1986, PP No 53 Tahun 1999, PP No 14 tahun 2001, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah tahun Nomor 30 tahun 2003. Saat ini pengelolaan perusahaan Perum Perhutani dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2010.

Perhutani sebagai Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan, perencanaan, penguasaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Desa Ciputri pada awalnya merupakan daerah wilayah Perum Perhutani sehingga lahan tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Ciputri untuk dijadikan lahan pertanian. Setelah adanya Perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), kemudian diklaim oleh pemerintah bahwa tanah tersebut merupakan tanah kehutanan dan harus dihutankan kembali.

Pengelolaan hutan Perum Perhutani di Desa Ciputri bekerjasama dengan masyarakat melalui program kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). PHBM merupakan realisasi dari konsep kehutanan sosial (*sosialforestry*) dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk berperan serta dalam mengelola sumberdaya alam berupa hutan. PHBM adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang sinergi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal dan peningkatan IPM yang bersifat fleksibel, partisipatif dan akomodatif. Saat ini pihak Perum Perhutani sudah tidak memiliki kepentingan lagi di wilayah Desa Ciputri karena termasuk daerah perluasan kawasan TNGGP.

b. Petani Penggarap Desa Ciputri

Petani penggarap di Desa Ciputri mengalami imbas dari perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Diawali petani membuka lahan untuk menggarap lahan kawasan berdasarkan adanya perjanjian PHBM oleh Perum

Perhutani pada tahun 1980an. Namun pada tahun 2003 menurut 2003 berdasarkan SK Menhut No 174, lahan garapan tersebut, dialihfungsikan karena mengalami perluasan TNGGP. Perubahan alih fungsi dari kawasan hutan produksi Perhutani menjadi kawasa konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).

Akibat perubahan alih fungsi petani tidak perbolehkan lagi menggarap kawasan hutan. Petani penggarap sebagian besar merupakan petani tanpa lahan yang sering disebut tunakisma. Sempat terjadi konflik antara petani penggarap dengan pihak TNGGP, bahkan sampai beradu fisik. Pada tahun 2005 dibuatlah surat pernyataan yang ditandatangani oleh petani penggarap. Dengan perjanjian tersebut petani diperbolehkan menggarap dengan ketentuan yang tertera di perjanjiannya. Setelah waktu yang ditentukan pada perjanjian tersebut habis, akhirnya pada bulan September 2013, seluruh petani penggarap sudah tidak boleh lagi melakukan kegiatan pertanian pada kawasan milik Perhutani yang dahulu menjadi lahan garapan mereka.

C. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Desa Ciputri, kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur merupakan bagian wilayah Resort Sarongge Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) yang memiliki luas wilayah 534 Ha dan termasuk dalam perluasan kawasan berdasarkan SK Menhut No. 174/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003. Wilayah Resort Sarongge terdiri dari batas buatan sepanjang kurang lebih 23 km. Kawasan ini hampir seluruhnya berbatasan dengan lahan milik masyarakat yang dikelola sebagai kebun sayur mayur dan ladang. Desa Ciputri ini berbatasan dengan:

- Utara : Desa Ciherang Kecamatan Pacet
- Selatan : Desa Galudra Kecamatan Cugenang
- Barat : Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
- Timur : Desa Cibeureum Kecamatan Cugenang

Desa Ciputri yang memiliki luasan ±534 Ha sebagian besar diperuntukan untuk daerah persawahan, pertanian atau ladang dan perikanan atau perkebunan. Dengan keadaan penggunaan lahan seperti itu pada umumnya kegiatan sehari - harinya adalah bertanam tanaman musiman.

Tabel 3 . Pola peruntukan lahan Desa Ciputri

No	Peruntukan Lahan	Luasan (Ha)	Presentase (%)
1	Permukiman / Perkarangan	9.59	1.8
2	Persawahan	200.379	37.5
3	Pertanian / ladang (Ha)	226.435	42.3
4	Perikanan / Perkebunan	81.22	15.2
5	Pengembalaan/ Hutan Negara	0	0
6	Infrstruktur / Prasarana Umum	17.14	3.2
	Jumlah	537.764	100

Sumber : Data Monografi Desa Ciputri 2015

Desa Ciputri merupakan daerah yang memiliki topografi lahan yang curam dengan kemiringan rata-rata 75 persen terletak pada ketinggian 1000 – 2900 mdpl dengan titik tertinggi terletak di Puncuk Gunung Gumuruh. Jenis tanah yang terdapat di Desa Ciputri wilayah Resort Sarongge yaitu Andosol dari batuan beku dan Intermedier di daerah gunung. Wilayah Resort Sarongge Desa Ciputri beriklim tipe A dengan suhu minimum 0° – 10° Celcius dan suhu maksimum antara 25° – 26° Celcius atau dengan kata lain suhu rata-rata sekitar 17.9° Celcius. Selain itu Resort Sarongge, Desa Ciputri mempunyai curah hujan yang tinggi dengan rata-rata 3380 mm/tahun.

2. Aksesibilitas dan Sarana Prasarana

Jalan menuju lokasi penelitian pada umumnya sudah dilakukan pengaspalan, namun perbatasan di Desa Galudra menuju lokasi penelitian jalan sebageaian besar sudah sedikit hancur dan jalan bergelombang karena jalan berupa aspal berbatu. Jarak lokasi penelitian ke Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) ± 24 km dengan waktu tempuh ± 1jam dan jarak ke kantor Ketua desa

± 5km dengan waktu tempuh ± 25 menit. Sarana transportasi umum yang ada untuk menghubungkan masing-masing Kampung hanya ada ojek saja, melihat dari jalan yang kurang baik jika menggunakan angkutan pedesaan roda empat. Angkutan pedesaan roda empat hanya sampai kantor desa. Prasarana dan fasilitas yang dimiliki desa diantaranya adalah kantor desa, posyandu dan PKK, bangunannya berada dalam satu lokasi dan cukup memadai, dengan adanya ruangan aula pertemuan dan tempat parkir. Hanya terdapat satu bangunan sekolah dasar/ sederajat dan Taman Kanak-kanak. Dan terdapat satu Radio Komunitas yang bernama Radio Edelweiss, terdapat empat belas masjid dan 34 langgar atau musholla, serta satu perpustakaan desa.

3. Kondisi Demografi

Berdasarkan data monografi potensi tahun 2015, penduduk Desa Ciputri adalah masyarakat pribumi asli. Jumlah penduduk di Desa Ciputri adalah 10.048 jiwa terdiri dari 5235 jiwa laki-laki dengan persentase 52 persen dan 4813 jiwa perempuan dengan persentase 48 persen. Jumlah dan persentase menurut jenis kelamin tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Ciputri Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)
1	Laki – Laki	5.235
2	Perempuan	3.813
Jumlah		10.048

Sumber : Data Monografi Desa Ciputri 2015

Berdasarkan data potensi desa tahun 2015 sebagian besar mata pencaharian penduduk di Desa Ciputri yakni Petani dengan jumlah sebanyak 1188 orang, sebagian besar petani pada sentra penghasil sayur-mayur dan menjual hasil panennya ke Cianjur atau ke Bogor bahkan ke pasar induk Jakarta dalam skala cukup besar.

Tabel 5. Mata Pencaharian Penduduk Kampung Sarongge, Desa Ciputri

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	PNS	29	1.3
2	Polisi	1	0.1
3	Petani	1.188	52.7
4	Pedagang	48	2.2
5	Wiraswasta	650	28.8
6	Lain – lain	335	14.9
Jumlah		2251	100

Sumber : Data Monografi Desa Ciputri 2015

4. Pendidikan

Berdasarkan data potensi desa tahun 2015 tingkat pendidikan di Desa Ciputri dapat dijelaskan bahwa jumlah data penduduk Desa Ciputri tercatat sebanyak 9 058 orang, terdiri dari jumlah persentase yang belum sekolah dan tidak tamat SD sebesar 14.89 persen. Tamat SD atau setaranya sebesar 79.13 persen tamat SMP atau setaranya sebesar 3.81 persen. Tamat SMA atau setaranya sebesar 1.75 persen. Tamat Diploma atau setaranya sebesar 0.24 persen dan Sarjana atau setaranya sebesar 0.18 persen. Kondisi tersebut menunjukkan rata-rata tingkat pendidikan masyarakat di dominasi pada tamatan SD. Pendidikan di Desa Ciputri bukanlah hal yang dipentingkan mengingat bahwa sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sehingga pendidikan merupakan hal yang tidak dianggap penting untuk sebagian penduduk.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Ciputri Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Belum Sekolah / Tidak Tamat SD	1349	14.9
2	Tamat SD	7168	79.1
3	SMP	345	3.8
4	SMA	158	1.8
5	Diploma	22	0,2
6	Sarjana	16	0,2
7	Lain – lain	0	0
Jumlah		9.058	100

Sumber : Data Monografi Desa Ciputri 2015

5. Struktur Sosial

Pada setiap kali ditanya pelapisan sosial, responden selalu menjawab tidak ada perbedaan yang mencolok diantara warga Desa Ciputri. Berdasarkan informasi yang dapat peneliti simpulkan dari informan walau tersirat, ada dua hal yang menjadi dasar penghargaan dalam masyarakat Desa Ciputri, (1) penghargaan yang diberikan berdasarkan pekerjaan (penguasa lokal) contohnya ketua kelompok tani, karyawan resort Sarongge, (2) penghargaan yang diberikan berdasarkan pendidikan formal atau informal yang dimiliki. Warga akan dianggap mampu jika telah mampu mengganti lantai rumah dengan keramik, memiliki pertanian yang luas dan milik sendiri, memiliki kendaraan bermotor terutama mobil, memiliki rumah yang bagus atau peralatan elektronik. Kemampuan menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi atau kemampuan ilmu agama menempatkan seseorang pada kelas sosial yang tinggi.

D. Deskriptif Data

Deskripsi hasil penelitian ini didasarkan pada skor yang berasal dari kuesioner yang digunakan untuk mengetahui perubahan kondisi sosial ekonomi petani eks penggarap hutan setelah perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

1. Identitas Responden

2. Usia Responden

Data primer yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa umur responden beragam antara 25 – 52 tahun. Pengelompokan usia responden dikategorikan menurut Robert J. Havighurst yang membagi usia ke dalam tiga fase yaitu ; *Early Adulthood* (dewasa muda) pada masa ini mereka berada pada usia 18-30 tahun, *Middle-age* (dewasa lanjut) Pada masa ini, seseorang yang telah dewasa lanjut berada pada usia 30-50 tahun, dan *Later maturity* (usia lanjut) Pada masa lanjut, mereka berada pada usia 50 tahun

**Tabel 7. Jumlah Dan Prosentase Umur Penduduk Kampung Sarongge,
Desa Ciputri**

No	Umur Responden	Jumlah	Prosentase %
1	18 – 30	13	21
2	31 – 55	31	51
3	>55	17	28
Jumlah		61	100

Sumber: Hasil Penelitian , Resort Sarongge 2016

Berdasarkan tabel 7. Dapat diketahui bahwa sebanyak 51 persen petani berusia 31 – 55 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kampung sarongge sudah dalam fase dewasa lanjut dan masih dalam usia produktif .

3. Lama Tinggal

Lama tinggal menunjukkan berapa lama responden telah tinggal dan menetap sebagai penduduk Kampung Sarongge , Desa Ciputri yang dihitung dalam satuan tahun. Pengklasifikasian lama tinggal responden dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu: kurang dari satu tahun, antara satu sampai dengan sepuluh tahun, antara sebelas sampai dua puluh tahun dan lebih dari sama dengan 21 tahun. Adapun secara lengkap tentang lama tinggal disajikan pada Tabel 8.

**Tabel 8. Jumlah Dan Persentase Responden Menurut Lama Tinggal Dalam
Rumah Tangga**

No	Lama Tinggal	Jumlah	Prosentase
1	<1 tahun	0	0.0
2	1 - 10 tahun	0	0.0
3	11 - 20 tahun	13	21
4	> 20 Tahun	48	79
	Jumlah	61	100

Sumber: Hasil Penelitian , Resort Sarongge 2016

Tabel 8 menunjukkan bahwa mayoritas responden di Resort Sarongge termasuk dalam kategori lebih dari 21 tahun sebanyak 48 orang atau 79 persen. Sedangkan responden yang tinggal pada kurun waktu 11 – 20 tahun hanya sebanyak

13 orang dengan prosentase sebanyak 21 persen. Dari data ini dapat diketahui bahwa rata – rata penduduk Kampung Sarongge sudah sangat lama tinggal di wilayah ini dan merupakan penduduk asli bukan pendatang.

2. Pekerjaan Responden

Adanya perluasan kawasan TNGGP maka banyak warga yang beralih profesi dari petani penggarap hutan menjadi profesi lain Berikut rincian perubahan mata pencaharian warga Kampung Sarongge setelah perluasan kawasan TNGGP

Tabel 9. Jumlah Frekuensi Perubahan Pekerjaan Utama

No	Indikator Mata Pencaharian	Jumlah	
		Frekuensi	Prosentase
1	Buruh Harian lepas	19	31
2	Buruh Harian lepas dan tukang ojek	4	7
3	Pedagang	10	16
4	Pengemudi	4	7
5	Pengemudi dan tukang ojek	3	5
6	Petani Pemilik	8	13
7	Peternak	11	18
8	Peternak dan tukang ojek	2	3
Jumlah		61	100

Sumber: Hasil Penelitian , Resort Sarongge 2016.

Dari tabel 9 diatas, terlihat adanya perubahan mata pencaharian utama akibat dari perluasan kawasan TNGGP. Perubahan ini dilakukan oleh para petani penggarap dikarenakan adanya larangan untuk menggarap kembali kawasan Perhutani yang dulunya mereka manfaatkan untuk menanam aneka sayur mayur. Ketidak adanya kemampuan lain selain bertani menyulitkan masyarakat Kampung Sarongge untuk beralih profesi, serta modal yang tidak memadai, sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat yang menjadi buruh harian lepas, dan tetap menjadi petani. Namun yang di garapnya bukanlah lahan miliknya melainkan lahan sewa milik perorangan ataupun milik perusahaan swasta yang berada di dalam Desa Ciputri.

Pada masa transisi perluasan kawasan TNGGP, pihak Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango memberikan insentif per-orangan kepada setiap petani penggarap hutan yang bersedia untuk turun hutan. Insentif tersebut berupa hewan ternak kelinci dan kambing serta uang tunai sebesar Rp. 750.000/ orang. Selama 10 bulan pemberian insentif ini di tujukkan bagi para petani agar mereka tidak lagi masuk ke dalam kawasan hutan konservasi dan beralih profesi ke pekerjaan lain. dalam praktiknya, memang masih ada beberapa petani yang merasa peraturan yang ditetapkan pemerintah terkait perluasan kawasan konservasi ini sangat merugikan mereka. Petani tersebut merasa bahwa hutan adalah milik bersama bukan milik perorangan ataupun milik pemerintah, oleh karena itu, penyuluhan dan sosialisasi akan peraturan ini masih terus dilakukan sampai saat ini. Pada akhirnya seluruh petani hutan pada bulan September 2013 dinyatakan tidak ada lagi yang menggarap hutan dan beralih ke profesi lain, diantaranya adalah buruh harian lepas, pedagang *driver*, peternak. Tapi profesi sebagai petani tidak hilang, mereka (eks petani hutan) masih menggarap lahan pribadi yang ada di pekarangan rumah dan lahan yang disewa untuk mereka tetap menjadi petani sayuran organik. Pekerjaan sebagai peternak di lakukan juga karena omzet nya yang cukup lumayan dan mendekati penghasilan yang didapat dengan menggarap hutan bahkan ada yang lebih, meskipun keuntungan tidak terlalu sering, seperti penjualan kambing yang hanya meningkat tajam ketika hari raya Idul Adha, yang dimanfaatkan para peternak untuk mempromosikan kambing ternak mereka ke luar wilayah Desa Ciputri, bahkan Jakarta. Karena omzet yang menjanjikan , banyak bekas petani penggarap yang memilih menjadi peternak ketika tidak diizinkan lagi menggarap hutan. Kegiatan peternakan juga di dukung oleh pemerintah dengan diberikannya insentif berupa kambing dan kelinci untuk menjadi modal awal petani menjadi peternak.

4. Kondisi Sosial Ekonomi

1) Tingkat Penghasilan Utama Responden

Penghasilan responden selama sebulan dibagi menjadi 4 kelas yaitu bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10. Jumlah Penghasilan Utama Responden/bulan

No	Jumlah Penghasilan	Sebelum Perluasan TNGGP		Sesudah Perluasan TNGGP	
		FREKUENSI	PROSENTASE	FREKUENSI	PROSENTASE
1	≤ Rp 1.500.000	0	0	0	0
2	Rp 1.500.001 – Rp 2.000.000	10	17	15	21
3	Rp 2.000.001 – Rp 2.500.000	24	40	35	50
4	>Rp. 2.500.000	27	43	20	28
Jumlah		61	100	61	100

Sumber: Hasil Penelitian , Resort Sarongge 2016.

Dari data tabel10 diatas, dapat dilihat penghasilan petani sebelum perluasan TNGGP paling banyak ada pada kategori > Rp.2.500.000. atau sebanyak 43 persen.hal ini dikarenakan banyak nya petani yang memiliki lahan garapan yang cukup luas. Sehingga dalam sebulan mereka bisa memperoleh penghasilan lebih dari Rp.2.500.000 , sedangkan petani dengan penghasilan paling rendah ada pada rentang Rp.1.500.000 - Rp. 2.000.000 . perbedaan penghasilan tersebut dikarenakan adanya perbedaan luas garapan yang dikelola oleh para petani. Setelah perluasan kawasan konservasi, seluruh kegiatan pertanian yang dilakukan di hutan yang dulunya milik Perhutani ditiadakan. Sehingga membuat penghasilan petani penggarap berubah, perubahan jumlah penghasilan terlihat jelas pada responden yang memiliki jumlah lahan yang cukup luas.Pada saat bekerja sebagai penggarap, mereka dapat menghasilkan pendapatan lebih dari.Rp.2.500.000 dan ketika perluasan terjadi, penghasilan mereka berkurang cukup banyak , perubahan jumlah pendapatan ini memaksa para petani untuk mencari penghasilan tambahan guna memenuhi kebutuhan harian yang terus bertambah.

2) Tingkat Penghasilan Sampingan Responden

Tabel 11. Penghasilan Sampingan Responden

No	Jumlah Penghasilan Sampingan	Sebelum Perluasan TNGGP		Sesudah Perluasan TNGGP	
		FREKUENSI	PROSENTASE	FREKUENSI	PROSENTASE
1	≤ Rp 500.000	30	43	23	33
2	Rp 500.001 – Rp 700.000	11	16	20	29
3	Rp 700.001 – Rp 1.000.000	9	13	11	16
4	> 1.000.000	6	7	7	10
Jumlah		61	100	61	100

Sumber: Hasil Penelitian , Resort Sarongge 2016.

Dari data tabel 11 diatas , dapat diketahui bahwa banyak petani yang memiliki penghasilan tambahan, namun sebelum adanya perluasan, jumlah penghasilan tambahan hanya sedikit atau hanya kurang dari Rp.500.000 rupiah. karena dari pertanian hutan sudah mencukupi. Setelah adanya perluasan, jumlah responden dengan penghasilan sampingan Rp.500.000 – Rp.700.000 meningkat, peningkatan ini banyak terjadi kepada petani yang istrinya ikut mencari nafkah. Penghasilan sampingan menjadi hal yang sangat penting, dikarenakan penghasilan dari pekerjaan utama setelah perluasan tidak bisa memenuhi kebutuhan. Karena rata – rata pekerjaan utamanya hanya buruh harian lepas, sehingga jika tidak ada penghasilan sampingan, kebutuhan harian tidak terpenuhi.

2. Status Sosial Ekonomi

1) Luas Rumah Responden

Tabel 12. Luas Rumah Responden

No	(Luas Rumah Responden M ²)	Sebelum Perluasan TNGGP		Sesudah Perluasan TNGGP	
		FREKUENSI	PROSENTASE	FREKUENSI	PROSENTASE
1	0 - 50 m ²	13	21	13	21
2	51 - 100 m ²	22	36	22	36
3	101 - 150 m ²	18	29	18	29
4	≥ 150 m ²	8	14	8	14
Jumlah		61	100	61	100

Dari data tabel 12. tidak terjadi perubahan terhadap luas rumah dari responden, sebanyak 36 persen dari responden memiliki rumah dengan luas 102 – 150 m². Hanya sekitar 14 persen dari total responden yang memiliki rumah seluas 150m². Dari hasil wawancara petugas Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, petani yang memiliki rumah dengan luas lebih dari 150 m² adalah petani yang ketika menggarap hutan dulu, menggarap lahan lebih dari 6 patok sehingga memiliki penghasilan yang cukup besar dan dapat membeli tanah yang luas untuk membangun rumah.

2) Status Kepemilikan Rumah

Tabel 13. Status Kepemilikan Rumah

No	Status Kepemilikan Rumah	Sebelum Perluasan TNGGP		Sesudah Perluasan TNGGP	
		FREKUENSI	PROSENTASE	FREKUENSI	PROSENTASE
1	Milik Sendiri	57	93	59	97
2	Sewa	4	7	2	3
Jumlah		61	100	61	100

Sumber: Hasil Penelitian , Resort Sarongge 2016.

Berdasarkan hasil lapangan, sebanyak 4 responden masih tinggal di rumah kontrakan. dan 57 responden sudah tinggal di rumah milik sendiri. Keadaan sedikit berubah setelah perluasan kawasan TNGGP, 2 responden sudah memiliki rumah sendiri di Desa Ciputri dan 2 responden lainnya masih dalam kondisi menyewa (kontrak), meskipun rumah yang dimiliki responden tersebut tidak begitu besar. Responden yang memiliki rumah tersebut rata – rata sudah turun temurun tinggal di Kampung sarongge sehingga kepemilikan rumah diturunkan dari orang tua nya.

3) Kondisi Fisik Rumah

a. Dinding Rumah

Tabel 14. Kondisi Dinding Rumah Responden

No	Jenis Tembok	Sebelum Perluasan TNGGP		Sesudah Perluasan TNGGP	
		FREKUENSI	PROSENTASE	FREKUENSI	PROSENTASE
1	Triplek	0	0	0	0
2	Tembok	44	72	52	85
3	Kayu	17	28	9	15
4	Bambu	0	0	0	0
	Jumlah	61	100	61	100

Sumber: Hasil Penelitian , Resort Sarongge 2016.

Dari hasil penelitian, terlihat kondisi dinding rumah responden sebelum perluasan sudah cukup layak, terlihat dari 44 responden yang dinding rumah nya sudah di tembok meskipun masih ada responden yang memakai kayu sebagai dindingnya. Penggunaan kayu dikarenakan kayu sangat mudah didapat ketika kawasan hutan masih menjadi milik Perum Perhutani. Setelah perluasan, ada yang kembali merenovasi rumahnya dan mengganti dinding kayu menjadi tembok bata. Penggantian ini dilakukan karena kondisi kayunya banyak yang sudah lapuk. Tetapi kayu masih menjadi bahan alternative disaat ada bagian tembok yang rusak.

b. Lantai Rumah

No	Jenis Lantai	Sebelum Perluasan TNGGP		Sesudah Perluasan TNGGP	
		FREKUENSI	PROSENTASE	FREKUENSI	PROSENTASE
1.	Keramik	26	43	26	43
2.	Semen	35	57	35	57
3.	Kayu	0	0	0	0
4.	Tanah	0	0	0	0
	Jumlah	61	100	61	100

Tabel 15. Kondisi Lantai Rumah Responden

Sumber: Hasil Penelitian , Resort Sarongge 2016.

Dari data tabel 15 tidak ada perubahan antara kondisi lantai rumah responden baik sebelum ataupun sesudah perluasan, karena kurangnya modal, maka jarang sekali petani yang merenovasi rumahnya meskipun lantainya masih semen. Dan penggunaan semen untuk lantai di Desa Ciputri masih sangat lazim.

c. Atap Rumah

Tabel 16. Kondisi Atap Rumah Responden

No	Jenis Atap	Sebelum Perluasan TNGGP		Sesudah Perluasan TNGGP	
		FREKUENSI	PROSENTASE	FREKUENSI	PROSENTASE
1	Genteng	23	38	30	49
2	Asbes	21	34	21	34
3	Seng	10	16	10	16
4	Kayu	7	11	0	0
	Jumlah	61	100	61	100

Sumber: Hasil Penelitian , Resort Sarongge 2016.

Kondisi atap rumah responden dari hasil penelitian lapangan menunjukkan penggunaan genteng sudah banyak di terapkan di rumah responden sebelum adanya perluasan kawasan. Meskipun demikian, responden yang menggunakan asbes , seng dan kayu juga masih ada, masing – masing sejumlah 21 responden menggunakan asbes, 10 responden menggunakan seng dan 7 responden menggunakan kayu. Setelah perluasan kawasan, responden yang menggunakan kayu sebagai atap rumah, menggantinya dengan genteng.

d. MCK

Tabel 17. Kondisi MCK Responden

No	INDIKATOR	Sebelum Perluasan TNGGP		Sesudah Perluasan TNGGP	
		FREKUENSI	PROSENTASE	FREKUENSI	PROSENTASE
1	Milik Sendiri	61	100	61	100
2	MCK umum	0	0	0	0
3	Sungai	0	0	0	0
4	Lainnya	0	0	0	0
	Jumlah	61	100	61	100

Seluruh responden yang di wawancara mengatakan bahwa sudah menggunakan MCK pribadi baik dari sebelum maupun sesudah perluasan kawasan. Sungai di wilayah desa memang dilarang untuk di gunakan mandi , buang air dan sebagainya, karena air sungai digunakan sebagai bahan baku rumah tangga di Desa Ciputri. Secara keseluruhan, hampir seluruh rumah yang ada di Kampung Sarongge sudah permanen, meskipun ada pencampuran antara tembok dan kayu, tapi rumah – rumah di Kampung Sarongge dapat dikatakan layak huni dan seluruh rumah di Kampung Sarongge sudah terdapat MCK pribadi.

4). Kepemilikan Alat Transportasi.

Tabel 18. Kepemilikan Alat Transportasi

No	Indikator	Sebelum Perluasan TNGGP		Sesudah Perluasan TNGGP	
		FREKUENSI	PROSENTASE	FREKUENSI	PROSENTASE
1	Sepeda	18	30	17	27
2	Sepeda Motor	43	70	44	73
3	Mobil	0	0.0	0	0
4	Semua	0	0.0	0	0
	Jumlah	61	100	61	100

Sumber: Hasil Penelitian , Resort Sarongge 2016.

Dari data di lapangan, sebanyak 43 responden atau 70 persen sudah memiliki sepeda motor sebelum perluasan .penggunaan sepeda motor oleh petani hanya diperuntukkan untuk ke lokasi hutan garapan. Petani yang tidak memiliki sepeda motor biasanya menumpang dengan petani yang memiliki tapi banyak juga yang memilih untuk berjalan kaki ke lokasi penggarapan. Tapi setelah perluasan kawasan, banyak petani yang memanfaatkan sepeda motornya untuk menjadi ojek sebagai pekerjaan utama maupun sampingan. Penggunaan sepeda biasanya diperuntukkan untuk anak – anak pergi ke sekolah.

5). Luas Lahan Garapan

Tabel 19. Luas Lahan Garapan Yang Kelola Petani

No	Luas Garapan	Sebelum Perluasan TNGGP		Sesudah Perluasan TNGGP	
		FREKUENSI	PROSENTASE	FREKUENSI	PROSENTASE
1	TIDAK MEMILIKI - < 400 m ²	1	1	38	63
2	401 m ² - 1600 m ²	27	39	23	38
3	1601 m ² - 3200 m ²	22	31	0	0
4	> 3200 m ²	11	16	0	0
Jumlah		61	100	61	100

Sumber: Hasil Penelitian , Resort Sarongge 2016.

Dari data yang tabel 19 diatas, dapat diketahui luas lahan garapan yang digarap oleh petani sebelum adanya perluasan kawasan, yakni sebanyak 27 petani menggarap lahan seluas 401 – 1600 m², atau biasa mereka menyebutnya patok, yang mana 1 patok nya seluas 400 m². Jadi jika di rata – rata kan, satu orang petani bisa menggarap sebanyak 4 patok bahkan lebih. Jumlah petani yang menggarap lebih dari 4 patok pun cukup banyak, yaitu 22 responden. Pada saat menggarap hutan biasanya mereka menanam berbagai jenis sayuran. Kepemilikan lahan yang digarap pada saat sebelum perluasan adalah milik Perum Perhutani dan milik Negara.

Setelah peraturan perluasan berlaku, semua lahan yang digarap praktis menjadi kawasan konservasi dan rehabilitasi dan berubah statusnya menjadi kawasan yang dilarang untuk di datangi apalagi untuk melakukan kegiatan pertanian. Keadaan ini memaksa 155 petani penggarap untuk meninggalkan lahan garapan nya. Pada akhirnya yang tersisa untuk digarap hanyalah lahan milik pribadi yang ada di pekarangan rumah ataupun bekerja sebagai buruh harian lepas pada perusahaan swasta sebagai petani kebun stroberi. Dari total 61 responden, sebanyak 38 responden tidak lagi memiliki lahan garapan, hanya tersisa 23 responden yang masih memiliki lahan untuk digarap, dan bukan berada di kawasan konservasi.

6). Kepemilikan Hewan Ternak

Tabel 20. Kepemilikan Hewan Ternak

No	Jenis Hewan Ternak	Sebelum Perluasan TNGGP		Sesudah Perluasan TNGGP	
		FREKUENSI	PROSENTASE	FREKUENSI	PROSENTASE
1	Unggas	37	53	0	0
2	Kelinci	10	14	0	0
3	Kambing / Sapi	14	20	0	0
4	Semua	0	0	61	100
Jumlah		61	100	61	100

Sumber: Hasil Penelitian , Resort Sarongge 2016.

Dari 61 responden , terdapat 37 responden yang sudah memiliki hewan ternak berupa ayam yang dipelihara namun bukan diperuntukkan untuk peternakan besar, karena jumlah yang dimiliki tidak banyak, hanya sekitar 5 ekor saja. 14 responden mengaku sudah memiliki kambing sebelum adanya perluasan kawasan. Dan setelah perluasan, seluruh responden dipastikan memiliki hewan ternak berupa kelinci ,ungas dan kambing. Memelihara kambing dan kelinci merupakan hewan ternak yang penting baginafkah penduduk Desa Ciputri. Kambing merupakan hewan ternak yang banyak dipelihara petani Desa Ciputri. Kambing dan kelinci tersebut pada umumnya adalah hasil pemberian dari pihak Balai Besar TNGGP sebagai isentif bagi petani yang sudah keluar dari kawasan untuk tidak menggarap lahan TNGGP. Umumnya satu petani di berikan dua kambing yaitu satu jantan dan satu betina. Hal ini diberikan pihak Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango bertujuan sebagai mata pencaharian alternatif petani.

7). Kepemilikan Alat Elektronik

Tabel 21. Kepemilikan Alat Elektronik

No	Alat elektronik (televisi. Radio, kulkas, mesin cuci, dvd player)	Sebelum Perluasan TNGGP		Sesudah Perluasan TNGGP	
		FREKUENSI	PROSENTASE	FREKUENSI	PROSENTASE
1	hanya 1	0	0	0	0
2	hanya 2	33	54	27	44
3	hanya 3	28	46	23	38
4	lebih dari 3 / semua	0	0	11	18
Jumlah		61	100	61	100

Sumber: Hasil Penelitian , Resort Sarongge 2016.

Dari hasil tabel 21 diatas, responden rata – rata sudah memiliki dua alat elektronik, seperti televisi dan kulkas. Jumlah alat elektronik pun banyak yang bertambah seiring dengan meningkatnya kebutuhan. Setelah perluasan ada 11 reponden yang sudah memiliki lebih dari 3 alat elektronik, dan menurut beberapa responden, alat tersebut dibeli pada saat masa transisi perluasan kawasan TNGGP

3. Pendidikan

Indikator pendidikan yang gunakan adalah kemampuan menyekolahkan anak. Karena petani di wilayah sarongge sudah sangat lama meninggalkan bangku sekolah, sehingga tidak dapat diukur. Kemampuan menyekolahkan anak ada pada tabel 22 di bawah ini

Tabel 22. Pendidikan Terakhir Anak

No	Tingkat Pendidikan	Sebelum Perluasan TNGGP		Sesudah Perluasan TNGGP	
		FREKUENSI	PROSENTASE	FREKUENSI	PROSENTASE
1	SD	0	0	0	0
2	SMP	41	67	0	0
3	SMA	20	33	61	100
4	Perguruan Tinggi	0	0	0	0
Jumlah		61	100	61	100

Sumber: Hasil Penelitian , Resort Sarongge 2016.

Dari tabel 22 diketahui sebanyak 41 responden, menyekolahkan anak nya sampai ke tingkat menengah pertama. Dan hanya 20 responden yang menyekolahkan sampai tingkat SMA / Sederajat. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan masih sangat tinggi di wilayah Desa Ciputri, karena pemikirannya nanti, anaknya akan meneruskan pekerjaan orang tuanya untuk bertani. Selain itu jauhnya akses ke SMA menjadi salah satu factor yang membuat rata – rata pendidikan di wilayah ini hanya sampai ke tingkat SMP.

4 Konsumsi Harian

Sebelum diberlakukannya peraturan tentang perluasan, responden mengaku makan 3 kali dalam sehari dengan lauk pauk yang beragam. Sayur menjadi salah satu makanan yang tidak pernah dilewatkan ketika makan, karena dipanen sendiri. Sedangkan setelah perluasan, mereka lebih banyak mengkonsumsi ikan untuk dijadikan lauk dikarenakan penghasilan yang menurun dan hanya mengkonsumsi ayam atau daging dua sekali dalam seminggu. Dari hasil tabel 23. Sebanyak 35 responden mengkonsumsi ayam sebagai lauk harian utama .dan hanya 15 responden yang mengkonsumsi ikan sebagai lauk utama.

Tabel 23. Konsumsi Lauk Pauk Utama

No	Lauk Pauk Utama	Sebelum Perluasan TNGGP		Sesudah Perluasan TNGGP	
		Frekuensi	Prosentase	Frekuensi	Prosentase
1.	Ayam	35	57	10	16
2.	Ikan	15	25	38	62
3.	Daging	0	0	0	0
4.	Sayur	11	18	13	21
	Total	61	100	61	100

Sumber: Hasil Penelitian , Resort Sarongge 2016

5. Kondisi Petani Setelah Perluasan.

Tabel 23. Kondisi Kesehatan Petani Setelah Perluasan

Kondisi Kesehatan	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Prosentase
Kondisi kesehatan bapak/ibu saat ini lebih baik jika dibandingkan dengan sebelum adanya penetapan kawasan oleh TNGGP	a. Sangat setuju	1	2
	b. Setuju	17	28
	c. Tidak setuju	2	3
	d. Sangat tidak setuju	0	0
	Total		61

Dari hasil penelitian, banyak responden yang merasa bahwa mereka dirugikan atas adanya perluasan ini. Keluhan tersebut didasari atas sulitnya mencari lapangan pekerjaan baru yang sesuai dengan kemampuan mereka. Meskipun sudah diberikan insentif, tetapi petani lebih memilih untuk tetap menggarap lahannya yang dulu.

Dari aspek kesehatan, responden mengaku menjadi lebih baik, karena puskesmas Desa dibangun setelah perluasan terjadi sehingga responden dapat dengan mudah mendapatkan fasilitas kesehatan tingkat 1. Selain karena puskesmas dekat, kesehatan petani menjadi lebih baik karena beban pekerjaan mereka berkurang, yang awalnya menggarap lahan luas, sekarang hanya lahan sempit.

E. Hasil Penelitian.

Perluasan TNGGP telah menyebabkan perubahan status penggunaan lahan pertanian di Desa Ciputri yang pada awalnya merupakan kawasan hutan produksi Perum Perhutani. Setelah adanya perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), kawasan yang semula dapat diakses/digarap untuk budidaya pertanian oleh warga Desa Ciputri, kini menjadi tidak dapat diakses. Sebagai akibat dari perubahan penggunaan kawasan diatas, kondisi sosial ekonomi petani berubah. Perubahan sosial ekonomi tersebut mencakup kedalam 6 indikator, yaitu :

1. Penghasilan
2. Status sosial ekonomi
3. Pekerjaan
4. Pendidikan
5. Pemenuhan kebutuhan pokok
6. Kondisi petani setelah perluasan kawasan.

Dari indikator penghasilan, Penghasilan petani yang tadinya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup dari hasil garapan kini tidak lagi bisa diandalkan. Penghasilan yang awalnya bisa sampai Rp. 2.500.000 sekarang hanya Rp. 1.500.000 sampai Rp.2.000.000 . Keadaan penghasilan yang menurun membuat petani harus mencari alternative lain untuk mendapatkan penghasilan sampingan. Penghasilan sampingan banyak didapatkan dari bekerja sebagai buruh tani harian ataupun menjadi supir pengantar sayur.

Indikator kedua yang terjadi perubahan adalah status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi diartikan pada kepemilikan rumah, barang berharga ataupun lahan garapan. Sebagian besar petani kini sudah tidak memiliki lahan atau tuna kisma. Kemudian bentuk penggunaan lahan di Desa Ciputri berubah menjadi lahan milik, lahan sewa, dan lahan bagi hasil. Perubahan penggunaan lahan yang dialami petani Desa Ciputri, menimbulkan lebih lanjut berupa upaya menggarap lahan secara bersama, budidaya tumpang sari, serta ternak kambing atau kelinci.

Perubahan yang terjadi pada aspek pekerjaan adalah terjadinya perubahan jenis pekerjaan, bekas petani penggarap kini banyak bekerja di bidang non pertanian. Perubahan ini didukung oleh pemerintah yang memberikan insentif berupa hewan ternak kambing dan kelinci untuk di budidayakan. Selain bekerja sebagai peternak kambing dan kelinci, bagi mereka yang masih memiliki lahan sempit, dimanfaatkan untuk pertanian organik. Dampak positifnya adalah, bekas lahan garapan yang kini sudah mulai ditumbuhi dengan tanaman endemic dan hutan yang gundul sudah kembali hijau.

Dari indikator pendidikan, hasil lapangan menunjukkan perubahan pendidikan yang ditempuh oleh anak dari responden. Sebelum perluasan, sebanyak 41 responden diketahui hanya menyekolahkan anaknya sampai tingkat pendidikan menengah pertama. Hal ini dikarenakan anak mereka membantu menggarap. Dan untuk pemenuhan kebutuhan pokok berdampak terhadap jenis lauk pauk utama yang dikonsumsi, berkurangnya jumlah penghasilan membuat pengeluaran untuk makan sehari – hari berkurang. Pada awalnya, rata – rata responden mengkonsumsi ayam sebagai lauk utama, namun setelah perluasan , lauk utama yang di konsumsi menjadi ikan dan sayuran .

Kondisi kesehatan responden setelah perluasan meningkat, peningkatan tersebut dipicu oleh keadaan pekerjaan responden sudah tidak lagi menggarap lahan luas. Hanya bekerja sebagai buruh harian lepas yang pekerjaannya tidak sebanyak ketika menjadi penggarap..

Pada bulan Oktober 2013, akhirnya seluruh petani bersedia untuk turun dan tidak menggarap kembali, namun pihak Taman Nasional masih terus mengadakan sosialisasi guna mengedukasi masyarakat Desa Ciputri akan pentingnya kawasan konservasi, sehingga di kemudian hari tidak ada lagi yang kembali ke hutan untuk melakukan kegiatan pertanian.